DEWI LILIANI 2226061012

PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB, LAMPUNG BARAT

Executive Summary or Abstract

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik. Namun, pengelolaan pariwisata di Lampung Barat masih belum optimal. Masalah-masalah seperti minimnya infrastruktur yang memadai, minimnya promosi dan pemasaran pariwisata, kurangnya pengelolaan sampah dan sanitasi yang baik, serta minimnya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata masih menjadi kendala yang menghambat perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Akibatnya, potensi wisata yang dimiliki Lampung Barat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pariwisata masih belum menjadi sektor yang mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata di Lampung Barat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Introduction or Summary of the Problem

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah dan keindahan alam yang memiliki potensial untuk dapat dikembangkan dengan baik agar dapat membantu mengembangkan pembangunan daerah itu sendiri.

Pembangunan daerah menjadi salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan upaya berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan untuk mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang — Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut hal tersebut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pariwisata adalah salah satu yang dapat dikembangkan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hal itu pemerintah terus berusaha dalam mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengenalakan kebudayaan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan bagian terintergrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Keberhasilan dalam

usaha pengembangan objek wisata ditentukan pada peran serta komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi wisata dengan berbagai pesona yang indah. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) potensi wisata kabupaten Lampung Barat berjumlah 77 destinasi wisata yanag teridri dari 14 objek Wisata Religi, 6 objek WIsata Budaya, 4 objek Wisata Danau, 23 objek Wisata Alam, 18 objek Wisata Sejarah, 5 objek Wisata Agro, 3 objek Wisata Buatan, 5 objek Wisata Cagar Alam.

Sebagai salah satu daerah yang menjadi destinasi para wisatawan,pemerintah Lampung Barat terus berupaya melakukan pengembangan objek wisata. Hal ini tertuang dalam Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah Lampung Barat menjadi daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terorganisir berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara lain penyediaan fasilitas, pelayanan dan bidang promosi.

Keadaan dan tantang yang dihadapi Kabupaten Lampung barat dalam rangka pengembangan maupun peningkatan pengelolaan destinasi wisata salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah mengadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Lampung Barat, namun tidak ada tindak lanjut dari peserta alumni peserta pelatihan tersebut, dan kemudian tidak ada kegiatan dalam tindakan-tindakan kepariwistaan.

Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak terwat dengan baik, seperti minimnya transportasi, akses menuju destinasi masih rusak, fasilitas objek wisata yang tidak terawatt dan minim nya atraksi yang terdapat di objek wisata sehingga hal ini menjadikan kurangnya daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Pariwisata tidak akan berkembang jika orang lain enggan untuk berkunjung karena tidak adanya informasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan promosi untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan obyek wisata kepada para wisatawan. Tujuan dari kegiatan promosi itu adalah untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Sehingga kemajuan teknologi digital pada saat ini berkembang dengan baik hal ini tentunya menjadikan suatu perubahan dalam mengelola informasi kepada masyarakat yang jauh lebih efektif. Akan tetapi dalam pelakasanaan nya, pengelolaan informasi digital ini tidak dikelola secara aktual. Hal ini dapat kita lihat informasi melalu website yang ada. Informasi yang diberikan paling terakhir pada tahun 2020.

Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagai pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan bidang pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut tertuang Perda

Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2016 -2031.

Rencana Pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat berupa pengelolaan pembangunan usaha pariwisata, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, pengelolaan lingkungan serta Pembangunan pasar wisata masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif karena masih banyak masyarat didaerah 4 Kabupaten Lampung Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat didaerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan di Kabupaten Lampung Barat sedangkan pengelolaan pariwisata di Lampung Barat sudah dicanangkan oleh pemerintahan daerah berupa peraturan kebijakan tentang pengelolaan pariwisata didaerah tersebut.

Bibliography

- N. Erna Marlia Susfenti. . "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-Cbt) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita". Jurnal. IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten.
- Suhardono, Edy. 2014. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pitana, I.., & Diarta, I.. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi
- Pitana, I. G., dan Gayatri, P. G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.

Yoeti,Oka A. 2006. Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pradnya Paramita.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2016 -2031.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Lampung Barat.*